



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKALIMAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **170032**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 454.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/123 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/36 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 480 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah Seluas 368 m² di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 288.900.000**

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.400.000
2. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
3. MOTOR, HONDA NF12A1CF/SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.800.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA TGN149R-MDMSKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 265.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 65.944.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 512.508.555**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.321.352.555
III. HUTANG	Rp.	32.900.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.288.452.555

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.